

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UNTUK  
MENGGANTI RUGI KORBAN KECELAKAAN PESAWAT DIMONIM  
AIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009  
TENTANG PENERBANGAN**

Dini Qurotul Aini

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.

Soetrisno, S.H., M.Hum.

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis konsep tanggung jawab hukum pengangkut udara atas kerugian yang diderita oleh penumpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak penumpang, terutama atas penyelesaian ganti rugi, masih berada di posisi yang lemah akibat ketiadaan peraturan pelaksanaan. Tujuan analisis ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pengangkut untuk mengganti rugi korban kecelakaan pesawat dimonim air ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan merupakan landasan normatif tanggung jawab pengangkut atas kerugian yang dialami oleh para korban baik korban jiwa yang meninggal dunia atau yang luka-luka, sesuai ketentuan Pasal 141 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009. Sekalipun PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) telah memberikan ganti rugi kepada korban kecelakaan pesawat perintis di Papua, namun tidak mengurangi tanggung jawab PT. Martha Buana Abadi terhadap para korban atau ahli warisnya, sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 14 Peraturan pemerintah Nomor. 17 Tahun 1965 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

**Kata kunci:** Ganti kerugian, Korban Kecelakaan, Pengangkut, Tanggung Jawab

**IMPLEMENTATION OF AIR CARRIER'S LIABILITY TO  
COMPENSATE VICTIMS OF DIMONIM AIRCRAFT ACCIDENTS IN  
VIEWED OF LAW NUMBER 1 OF YEAR 2009 CONCERNING  
AVIATION**

Dini Qurotul Aini

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.

Soetrisno, S.H., M.Hum.

**ABSTRACT**

*This research analyzes the concepts of air carrier legal liability for disadvantages afflicted by the passengers. The results show that the rights of the passengers, particularly on the matter of compensation settlement, are still in a weak position because of the absence of implementing regulations. The purpose of this study is to find the implementation of the responsibility the carrier takes to compensate victims of airplane accident in accordance of Law Number 1 of Year 2009 concerning aviation. The method used in this study is normative juridical, and it can be concluded, that: Law Number 1 Year 2009 on Aviation is the normative basis of carrier's liability for disadvantages suffered by victims both fatalities and injuries, according to the provisions of Article 141 paragraph 1 of Law Number 1 Year 2009. Even though PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) has provided compensation for the victims of airplanes accident of pioneer aircraft in Papua, it does not diminish the liability of PT. Martha Buana Abadi to the victims or their heirs, as determined in the provisions of article 14 Government Regulation Number 17 of 1965 as regulations for the implementation of Law Number 33 of 1964 concerning Passenger Accident Liability Funds.*

**Keywords:** Accident's victim, Carrier, Compensation, Liability